

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN  
*HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS*  
“BAHAGIA” DI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial disabilitas fisik pada Panti Sosial Bina Daksa "Bahagia" Sumatera Utara diintegrasikan secara nasional ke Panti Sosial Bina Daksa "Budi Perkasa" Palembang;
- b. bahwa rehabilitasi sosial bagi orang dengan *Human Immunodeficiency Virus* menjadi tugas utama Kementerian Sosial, sehingga perlu optimalisasi layanan rehabilitasi sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan alih fungsi Panti Sosial Bina Daksa "Bahagia" Sumatera Utara menjadi Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang dengan *Human Immunodeficiency Virus* “Bahagia” di Medan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang dengan *Human Immunodeficiency Virus* “Bahagia” di Medan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* “BAHAGIA” DI MEDAN.

## BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 1

- (1) Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Orang dengan *Human Immunodeficiency Virus* “Bahagia” di Medan selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut PSRSOD HIV “Bahagia” merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial untuk penanganan orang dengan HIV yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan pembinaan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- (2) PSRSOD HIV “Bahagia” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

### Pasal 2

PSRSOD HIV “Bahagia” mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada orang dengan HIV.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PSRSOD HIV “Bahagia” menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan registrasi dan asesmen orang dengan HIV;
- c. pelaksanaan rehabilitasi sosial orang dengan HIV;
- d. pelaksanaan advokasi sosial;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan terminasi orang dengan HIV;
- f. pemetaan data dan informasi orang dengan HIV; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

PSRSOD HIV “Bahagia” terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Asesmen;
- c. Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial;
- d. Seksi Advokasi Sosial; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan observasi dan identifikasi, serta pemetaan data orang dengan HIV.
- (3) Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan perencanaan, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial orang dengan HIV.
- (4) Seksi Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melakukan perencanaan, fasilitasi pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi advokasi sosial dan pengelolaan informasi.

### Pasal 6

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas pekerja sosial, penyuluh sosial, dan sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan asesmen dan layanan rehabilitasi sosial serta tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PSRSOD HIV “Bahagia”, dibentuk instalasi produksi.
- (2) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keterampilan kerja yang bersifat ekonomis produktif.
- (3) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Panti.
- (4) Koordinator instalasi produksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti dan secara

teknis berkoordinasi dengan kepala seksi sesuai bidang tugas masing-masing.

#### Pasal 9

Bagan organisasi PSRSOD HIV “Bahagia” tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### TATA KERJA

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PSRSOD HIV “Bahagia” harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien.
- (2) PSRSOD HIV “Bahagia” harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan PSRSOD HIV “Bahagia”.
- (3) Kepala Panti, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dalam hubungan antarsatuan organisasi dalam lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 11

Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan PSRSOD HIV “Bahagia” dalam melaksanakan tugasnya wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan organisasi PSRSOD HIV “Bahagia” wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 13

Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan organisasi PSRSOD HIV “Bahagia” wajib mengolah dan mempergunakan setiap laporan yang diterima dari bawahannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 14

Laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB IV

#### ESELON

#### Pasal 15

- (1) Kepala Panti merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### LOKASI DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 16

PSRSOD HIV “Bahagia” berlokasi di Medan, Provinsi Sumatera Utara.

#### Pasal 17

Wilayah kerja PSRSOD HIV “Bahagia” meliputi wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

Dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan fungsinya, PSRSOD HIV “Bahagia” merupakan panti sosial percontohan dan digunakan sebagai laboratorium sosial.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 163/HUK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Daksa “Bahagia” Sumatera Utara, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan Peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 20

Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Panti Sosial Bina Daksa “Bahagia” Sumatera Utara, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.



## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Perubahan organisasi dan tata kerja PSRSOD HIV “Bahagia” berdasarkan Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### Pasal 22

Pelaksanaan alih fungsi Panti Sosial Bina Daksa “Bahagia” dilaksanakan efektif mulai bulan Januari 2017.

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 163/HUK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Daksa “Bahagia” Sumatera Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2016

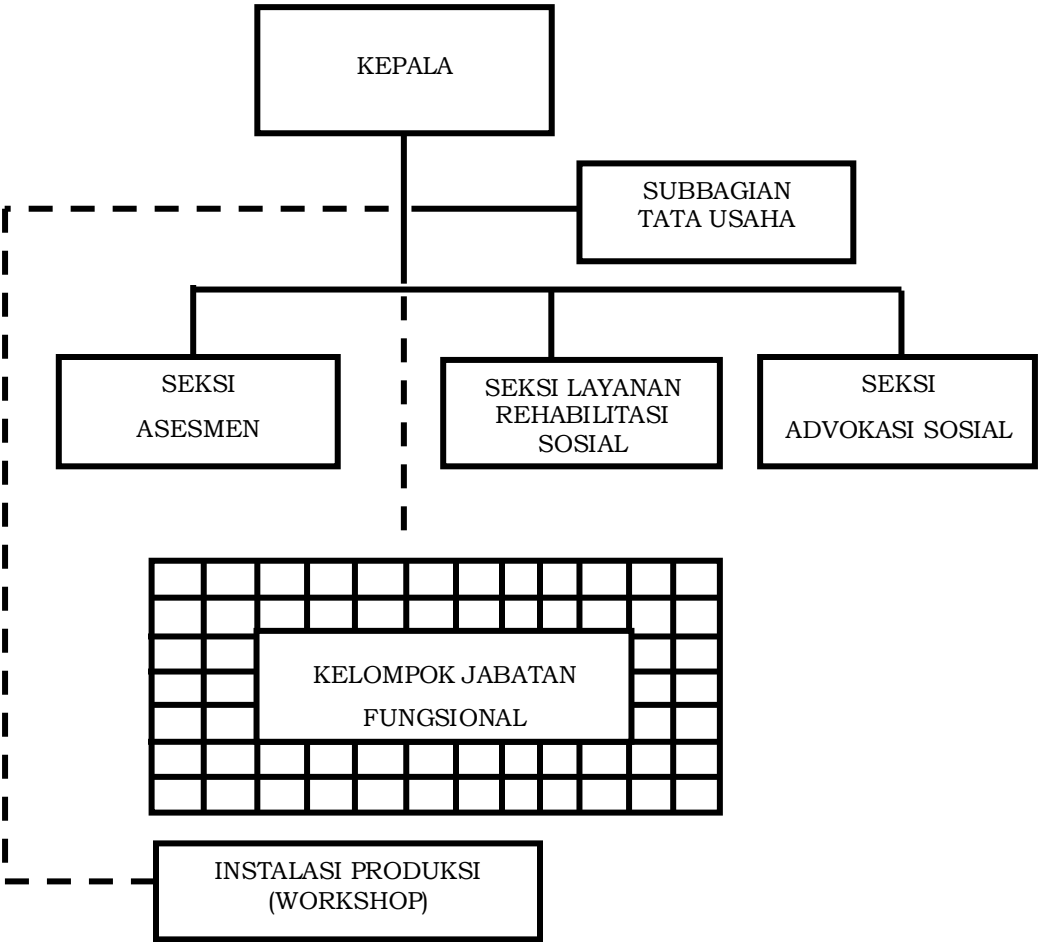
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1652

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI  
SOSIAL REHABILITASI SOSIAL ORANG  
DENGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY*  
*VIRUS* “BAHAGIA” DI MEDAN



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA